



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda Komplek Perkantoran Kota Tasikmalaya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 440/ -Dinkes

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVIU
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 02 April 2019

The picture can't be displayed.

KEPALA DINAS KESEHATAN

H. Cecep Zainal Kholis, dr, M.MKes
Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19590505 198801 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : 440/ -Dinkes

Tanggal : 02 April 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat, tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan kesehatan.	Realisasi jaminan kesehatan masyarakat miskin terhadap jumlah masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	Dinas Kesehatan	Perpres No. 82 Tahun 2018
2.	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah	Jumlah kematian bayi dibawah 1 tahun dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 1.000 kelahiran hidup (KH)	Dinas Kesehatan	Kepmenkes RI HK. 02.02/Menkes/52/2015
.		Angka Kematian Ibu	per 1000 kelahiran hidup	Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hami, bersalin dan nifas dalam suatu wilayah atau periode tertentu terhadap jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama kali 100.000 kelahiran hidup (KH)	Dinas Kesehatan	Kepmenkes RI HK. 02.02/Menkes/52/2015
.		Prevalensi Stunting	%	Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan	Jumlah kasus stunting (pengukuran pada anak balita berdasarkan tinggi badan menurut Umur (TB/U) pada balita terhadap jumlah seluruh balita pada periode tertentu kali seratus	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014
3.	Meningkatnya upaya pencegahan dan	Prosentase capaian SPM penyakit	%	SPM merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya	Cakupan implementasi penanganan penyakit menular	Dinas Kesehatan	Permenkes No. 43 Tahun 2016, PP nO. 2 Tahun 2018,

	pengendalian penyakit	menular dan tidak menular			dan penyakit tidak menular terhadap seluruh variable SPM penyakit menular dan tidak menular kali seratus persen		Permendagri 100 Tahun 2018
4.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.	Jumlah total nilai persepsi kepuasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh puskesmas dalam kurun waktu yang sama kali seratus persen	Dinas Kesehatan	Permen PAN-RB Republik Indonesia No 14 Tahun 2017
.		Prosentase Puskesmas Terakreditasi	%	Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi	Jumlah puskesmas yang telah diakreditasi dibanding jumlah seluruh puskesmas kali seratus persen	Dinas Kesehatan	Permenkes no. 46 tahun 2015
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan manajemen serta pelayanan publik	Hasil penilaian SAKIP Dinas Kesehatan	Poin	Implementasi SAKIP wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu kinerja, anggaran, dan reformasi birokrasi secara selaras dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	Jumlah poin penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dalam periode tertentu	Dinas Kesehatan	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Permen PAN-RB Republik Indonesia No 53 Tahun 2014
.		Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	Level	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern	Level penilaian Sistem Pengendalian Intern Dinas Kesehatan dalam periode tertentu	Dinas Kesehatan	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

KEPALA DINAS KESEHATAN

H. Cecep Zainal Kholis, dr, M.MKes

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19590505 198801 1 002